

KEMISKINAN, INOVASI DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Shofyyan Shory, Zaili Rusli dan Harapan Tua R.F.S

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Poverty, Innovation and Hope Family Program. This study aims to determine the Implementation of the Hope Family Program Policy Innovation in Langgam District, Pelalawan Regency and to find out what are the supporting factors and inhibitors. The research method used is a qualitative descriptive method. Informants in this study were heads of social protection and security, district coordinators, district operators, social welfare officers, sub-district coordinators, social assistants, beneficiary families, independent bank employees. Techniques for collecting data using observation, interviews and documentation. Data analysis through stages, starting from data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of the family planning program policy innovations in Langgam District, Pelalawan Regency has not run optimally.

Keywords: poverty, innovation, family hope, programs

Abstrak: Kemiskinan, Inovasi dan Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan untuk mengetahui faktor apa saja pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, koordinator kabupaten, operator kabupaten, kasi kesejahteraan sosial, koordinator kecamatan, pendamping sosial, keluarga penerima manfaat, pegawai bank mandiri. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan, mulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan inovasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan optimal.

Kata kunci: kemiskinan, inovasi, program, keluarga harapan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara besar dan negara sedang berkembang yang memiliki hampir 264 juta penduduk, tentunya Indonesia tidak lepas dari isu kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan antara pendapatan sikaya dan simiskin, untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut dibutuhkan peran aktif pemerintah dari suatu orde ke orde selanjutnya. Menurut Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.

Proses pemerintahan yang sedang berlangsung pada saat ini juga menghadapi persoalan yang serupa, yaitu kemiskinan. Berbagai bentuk program dan stimulus yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menanggulangi dan pengetasan kemiskinan selama ini belum memberikan dampak yang begitu maksimal sehingga sampai saat ini tujuan dari rencana pembangunan nasional terkait permasalahan dan peningkatan kesejahteraan sosial masih menjadi masalah yang belum teratasi secara maksimal. Dikarenakan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan yang ada sebelumnya tidak berfungsi secara maksimal maka pemerintah secara sinergi

dan sistematis membentuk program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Secara umum Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Tujuan Program Keluarga Harapan (Permensos nomor 01 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2) adalah

1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Program keluarga harapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, sudah sejak tahun 2007 digulirkan di Provinsi Riau. Dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, baru dua Kabupaten yang mendapatkan jatah alokasi anggaran program keluarga harapan yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan dijadikan program keluarga harapan menjadi program nasional maka program tersebut menjangkau ke 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau termasuk salah satunya Kabupaten Pelalawan yang menjadi sasaran program keluarga harapan yang diharapkan kedepannya program tersebut dapat membantu Peme-

rintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam permasalahan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan program keluarga harapan pada tahun 2014. Program ini merupakan suatu kebijakan yang didesain untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Namun demikian, ada berbagai isu atau fenomena yang muncul dilapangan dimana ada kesenjangan program keluarga harapan yang telah didesain pemerintah melalui Kementerian Sosial pada aplikasinya dilapangan, dan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul maka program keluarga harapan terus melakukan pembaharuan atau berinovasi. Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan penelitiannya adalah bagaimana inovasi kebijakan pelaksanaan Keluarga Harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan?

Menurut Bartos dalam Sangkala (2014), Inovasi sektor Publik adalah suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi. Oleh sebab itu suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus adanya pembaharuan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah publik sehingga dari pelaksanaan inovasi tersebut mencapai tujuan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

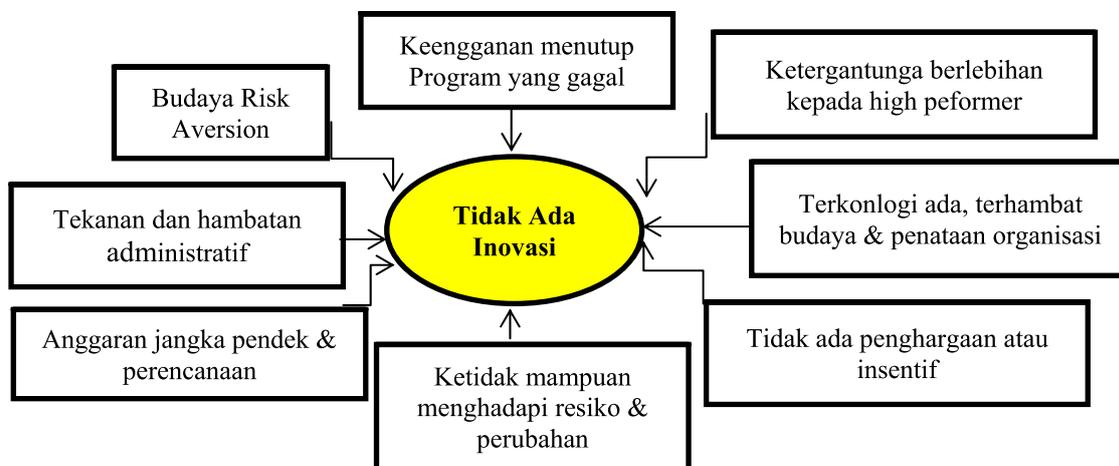
Akan tetapi dalam penerapan inovasi didalam kebijakan publik tidak semata-mata penerapan begitu saja, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh pemerintah disaat menerapkan inovasi di sebuah kebijakan sesuai dengan pendapat *United Nations* dalam Sangkala (2014) mengenai *best practise* ada beberapa unsur dalam pelaksanaan inovasi sektor publik yaitu dampak (*impact*), kemitraan (*partnership*), keberlanjutan (*sustainability*), kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership dan community empowerment*), kesetaraan gender dan pengecualian sosial (*gender equality dan social inclusion*), inovasi dalam konteks dan dapat ditransfer (*inno-*

vation within local content dan transferability). Artinya jika semua unsur tersebut dapat terpenuhi dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan program keluarga harapan, maka Inovasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dinyatakan optimal sesuai dengan tujuannya yaitu mengentaskan dan menanggulangi kemiskinan.

Odoji dalam Nawawi (2009) berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan adalah

sesuatu yang jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Grubb dalam Siahaan (2010) menyampaikan lebih jauh bahwa terdapat empat faktor penting penentu keberhasilan inovasi. Masing-masing adalah faktor sosial, kebijakan, teknologi dan ekonomi. Faktor-faktor ini mempunyai pengaruh kuat yang berbeda dalam tiap inovasi.

Gambar 1. Faktor Penghambat Inovasi Sektor Publik



(Albury dalam Suwarno, 2008)

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar. Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004) yang mendefinisikan bahwa : Kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksana-

naan inovasi kebijakan Program Keluarga Harapan Kabupaten Pelalawan.

Program keluarga harapan sudah melakukan inovasi-inovasi dalam menghadapi persoalan-persoalan, Walaupun sudah berinovasi tetap saja ada ditemukan kesenjangan antara *das Sain* dengan *das sollen* seperti sasaran utama program keluarga harapan adalah keluarga miskin atau keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat atau komponen dan terdaftar di data base kementerian sosial akan tetapi masih saja ada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang mampu secara ekonomi namun ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat bahkan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan yang seharusnya menjadi sasaran utama program komplementaritas seperti KIP, KIS, KKS, Ranstra, E-warong Kube, Rutilahu, Subsidi

LPG, Subsidi Pupuk, Subsidi PLN, Bansos Pemda yang seharusnya keluarga penerima manfaat program keluarga harapan menjadi prioritas utama tidak dapat bantuan tersebut, dan bahkan karena disebabkan banyaknya program-program bantuan sosial dari pemerintah meningkatnya keinginan masyarakat yang merasa miskin supaya dapat bantuan sosial dari pemerintah terkhusus bantuan sosial program keluarga harapan, dan Kegiatan *family development session* (FDS) yang menjadi ujung tombak program keluarga harapan belum terlaksana sebagai mana mestinya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. *Informan* dalam penelitian ini adalah kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial, koordinator kabupaten, operator kabupaten, kasi kesejahteraan sosial, koordinator kecamatan, pendamping sosial, keluarga penerima manfaat, pegawai bank mandiri dengan metode pengambil *informan* menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis melalui reduksi data, model data/penyajian data dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi kebijakan program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan keluarga penerima manfaat di kecamatan langgam kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan analisis kualitatif deskriptif dapat diketahui bahwa dampak bantuan sosial program keluarga harapan yang dirasakan dalam jangka pendek menambah keuangan keluarga penerima manfaat, akan tetapi dampak dalam jangka panjang diharapkan keluar dari rantai kemiskinan belum terlihat, adapun yang dianggap sudah mampu oleh petugas pendamping PKH peserta tersebut sudah mampu sebelum mendapatkan bantuan PKH. Artinya dampak nyata (*tangible*) program keluarga harapan dikecamatan Langgam

belum optimal. Kemitraan dalam program keluarga harapan melebihi dua pemangku kepentingan (*stackholder*), dan setiap pemangku kepentingan ada keterlibatannya sebagaimana fungsinya. Artinya kemitraan dalam program keluarga harapan sudah optimal.

Keberlanjutan program keluarga harapan terus menerus dilakukan hal ini terlihat dari program keluarga harapan pada awalnya tahun 2007 sampai 2018 terus mengalami pembaharuan, baik dari *legislasi*, kerangka institusional, kebijakan sosial dan efisiensi dan transparansi, seperti contohnya dalam legislasi, kerangka institusional, kebijakan sosial adanya pembaharuan kebijakan yang sekarang berpedoman pada Permensos No Tahun 2018, dan dalam efisiensi, transparan dan akuntabel terlihat dalam pencairan bantuan sosial menggunakan sistem perbankan. Artinya Inovasi kebijakan program keluarga harapan di kabupaten Pelalawan terkhusus dikecamatan Langgam ditinjau dari Keberlanjutan sudah optimal.

Aktor kepemimpinan yang menjadi inspirasi, motivasi bagi keluarga penerima manfaat adalah pendamping PKH, kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan kegiatan FDS (*family development sessions*), akan tetapi dalam kegiatan pemberdayaan melalui FDS, petugas PKH harus didiklat, dikecamatan Langgam hanya koordinator kecamatan saja yang sudah didiklat menyebabkan kegiatan FDS tidak berjalan semestinya. Artinya inovasi kebijakan program keluarga harapan di tinjau dari Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Langgam belum optimal.

Petugas program keluarga harapan melakukan kegiatan dan pelayanan kepada penerima bantuan sosial semuanya sama tidak ada yang di beda bedakan, Namun ada perbedaan dalam jumlah nominal bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat komponen regular dan komponen Lansia berjumlah Rp. 1.890/tahun, akan tetapi keluarga penerima manfaat komponen disabilitas berat jumlah nominal bantuan sosial 2jt/tahun. Artinya Inovasi kebijakan prog-

ram keluarga harapan di tinjau dari Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial belum optimal. Kemudian belum ada sesuatu yang baru dikabupaten Pelalawan dan Kecamatan Langgam yang dapat ditransfer dan dicontoh oleh daerah lain dalam pelaksanaan program keluarga harapan. Artinya Inovasi kebijakan program keluarga harapan di kabupaten Pelalawan terkhusus di kecamatan Langgam tinjau dari Inovasi dalam konteks dan dapat ditransfer (*innovation within local content dan transferability*) belum optimal.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan inovasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Faktor pendukung, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Provinsi Riau memberikan insentif bagi petugas pelaksana Program Keluarga Harapan berupa bantuan operasional pendamping (BOP), Kemudian faktor penghambat, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran kegiatan, Sumber daya manusia yang belum didiklat FDS, Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi, dan Budaya keluarga penerima manfaat belum bisa melakukan transaksi melalui sistem perbankan seperti sering terjadinya kartu KKS hilang, Kartu KKS terblokir, Pin ATM kartu KKS hilang.

PEMBAHASAN

Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya harus memiliki tujuan dan berdampak bagi kehidupan masyarakat ramai, begitupun kebijakan program keluarga harapan diharapkan dampaknya bagi masyarakat miskin keluar dari jeruji kemiskinan. Dan dampak tersebut sesuai dengan tujuan secara umum Program Keluarga Harapan memiliki yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga penerima manfaat dan program keluarga harapan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam kepada keluarga penerima manfaat PKH, tim pelaksana PKH kecamatan dan kabupaten, dan tim koordinasi PKH kecamatan dan kabupaten, dampak yang dirasakan oleh keluarga penerima manfaat dalam waktu dekat memang membantu keuangan keluarga penerima manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak yang dirasakan dalam waktu yang panjang keluarga penerima manfaat tersebut diharapkan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan akan tetapi dikecamatan Langgam belum terlihat. Seperti para informan yang berasal dari keluarga penerima manfaat yang penulis ambil untuk memberikan informasi yang sudah mendapat bantuan selama lebih kurang 4 tahun untuk komponen regular dan lebih kurang 2 tahun untuk komponen kesejahteraan sosial, akan tetapi dalam jarak waktu selama itu kehidupan perekonomian keluarga penerima manfaat belum juga ada perubahan, adapun keluarga penerima manfaat yang dianggap mampu oleh petugas kemudian dikeluarkan dari kepesertaan PKH karena yang bersangkutan sudah mampu sebelum mendapatkan bantuan. Dapat disimpulkan bahwa dampak yang nyata (*tangible*) memutus rantai kemiskinan program keluarga harapan di Kecamatan Langgam belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim pelaksana PKH kecamatan dan kabupaten serta tim koordinasi kecamatan dan tim koordinasi Kabupaten Pelalawan, ada beberapa instansi yang bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan program keluarga harapan yaitu dalam hal melakukan penyaluran bantuan social bersama bank mandiri yang menyediakan kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang digunakan sebagai ATM untuk penerima bantuan, dalam hal anak peserta PKH bias mengakses pendidikan, dinas pendidikan di tingkat kabupaten serta UPTD pendidikan dikecamatan. Mitra kerja dalam hal anak peserta penerima PKH bias melakukan akses kesehatan dalam hal ini berobat yaitu dinas kesehatan di tingkat kabupaten dan dikecamatan puskesmas dan pustu/poskesdes.

Berdasarkan wawancara kepada tim pelaksana PKH kecamatan dan kabupaten, dan tim koordinasi kecamatan dan kabupaten serta pegawai bank mandiri, dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya mitra kerja dalam kegiatan-kegiatan program keluarga harapan lebih dari dua *Stackholder* atau pemangku kepentingan dan setiap lembaga tersebut keikutsertaannya sesuai sebagaimana fungsinya. Artinya inovasi program keluarga harapan dalam konteks kemitraan (*partnership*) sudah dapat dikatakan sudah optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada tim pelaksana dan tim koordinasi PKH di kecamatan langgam dan Kabupaten Pelalawan, diketahui bahwa program keluarga harapan terjadinya keberlanjutan baik dari segi *legislasi*, kerangka peraturan, maupu efisiensi, akuntabilitas dan transparansi sperti pada tahun 2007 program keluarga harapan hanya program rintisan kemudian pada tahun 2012 dijadikan program nasional dan target pemerintah pusat pada tahun 2018 penerima bantuan 10 juta KPM, kemudian dari segi peraturan mengalami pembaharuan dan komponen terbaru dalam PKH yaitu komponen kesejahteraan sosial yang meliputi masyarakt miskin yang usia lanjut di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat, kemudian pedoman kegiatan pelaksanaan PKH yang terbaru adalah Permen-sos No 1 Tahun 2018, dan dalam segi efisiensi, akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial melalui sistem perbankan di bawah naungan himbara. Artinya keberlanjutan program keluarga harapan sudah optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada keluarga penerima manfaat, tim pelaksana pkh kecamatan langgam serta tim pelaksana PKH kabupaten dan tim koordinasi Kabupaten Pelalawan, kemudian tim pelaksana PKH Kecamatan Bandar Seikijang yang peneliti wawancara sebagai perbandingan, sosok yang menginspirasi, memotivasi dan menasehati keluarga penerima manfaat petugas pelaksana PKH dikecamatan yaitu pendamping PKH. Adapun bentuk pemberdayaan dalam PKH yaitu kegiatan FDS

(*family development sessions*) akan tetapi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan FDs petugas harus harus didiklat FDS. hanya sebagian kecil pendamping PKH di kabupaten Pelalawan yang sudah diklat FDS menyebabkan kegiatan pemberdayaan melalui FdS belum terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada keluarga penerima manfaat PKH, tim pelaksana dan tim koordinasi Kecamatan Langgam serta tim pelaksana dan tim koordinasi Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan kesetaraan gender dan pengecualian sosial dalam segi pelayanan semuanya sama, akan tetapi dalam jumlah bantuan yang diberikan dibedakan.

Dengan keberhasilan inovasi disuatu daerah berhasil dilaksanakan bias ditiru oleh pihak lain dalam hal ini daerah lain yang juga melaksanakan program keluarga harapan. Berdasarkan hasil wawancara kepada tim pelaksana dan tim koordinasi Kecamatan Langgam serta tim pelaksana dan tim koordinasi Kabupaten pelalawan, sesuatu yang baru belum ada yang dapat di transfer atau dicontoh daerah lain. Artinya inovasi pelaksanaan program keluarga harapan di kabupaten pelalawan terkhusus dikecamatan Langgam ditinjau dari unsur Inovasi dalam konteks dan dapat ditransfer (*innovation within local content dan transferability*) belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada keluarga penerima manfaat, tim pelaksana PKH dan tim koordinasi Kecamatan Langgam dan tim pelaksana PKH dan tim koordinasi kabupaten pelalawan, serta perbandingan peneliti tim pelaksana PKH Kecamatan Bandar Seikijang dan pegawai bank mandiri KCP PT.Rapp sebagai mitra dalam melakukan pencairan bantuan sosial, Dapat penulis tarik kesimpulan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan inovasi kebijakan program keluarga harapan dikecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut :

1. Faktor pendukung, sebagai berikut ;
Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Provinsi Riau memberikan

Insentif bagi Petugas Pelaksana PKH berupa Bantuan Operasional Pendamping (BOP).

2. Faktor penghambat, sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana
 - b. Tebatasnya Anggaran Kegiatan
 - c. Sumber Daya Manusia belum di diklat FDS
 - d. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi
 - e. Budaya Keluarga Penerima manfaat yang belum bisa melakukan transaksi melalui sistem perbankan seperti Kartu KKS Hilang, Pin ATM Hilang, ATM terblokir.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan optimal optimal. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan inovasi kebijakan program keluarga harapan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Faktor pendukung, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Provinsi Riau memberikan insentif bagi petu-

gas pelaksana PKH berupa bantuan operasional pendamping (BOP), kemudian faktor penghambat, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran kegiatan, Sumber daya manusia yang belum didiklat FDS, Kurangnya Komunikasi dan Kordinasi, dan Budaya Keluarga Penerima manfaat yang belum bisa melakukan transaksi melalui sistem perbankan seperti sering terjadi Kartu KKS Hilang, Pin ATM Hilang, ATM terblokir.

DAFTAR RUJUKAN

- Nawawi, Ismail. 2009 . Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya : Gramedia
- Sangkala. 2014. Innovative Governance : Konsep dan aplikasi. Surabaya. Capiya Publishing.
- Siahaan Saut, dkk. 2010. Inovasi Teknologi PLTMH & PLTB Lembaga Litbang Pemerintahan. Jakarta : Lili Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Gava Media.
- Suwarno, yogi. 2008. Inovasi di Sektor Publik. Jakarta. STIA-LAN Press.